

## **Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dengan Aplikasi SIPD Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo**

**Nella Ayu Shintya, Riza Dessy Nila Ayuntika**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
[Email Korespondensi : nellaayu04@gmail.com](mailto:nellaayu04@gmail.com)

*Dikirim : Juli 2024.*

*Diterima : Agustus 2024.*

### **ABSTRACT**

*The payroll accounting information system is an important component in financial management, because it plays a significant role in ensuring the accuracy, orderliness, and accountability of employee salary payments. This study examines the Civil Servant (PNS) payroll accounting system using the SIPD (Regional Government Information System) application at the Population and Family Planning Control Office of Ponorogo Regency. This study uses a qualitative approach with data collection methods through direct observation, interviews, and documentation at related agencies. This study aims to analyze the implementation of the Civil Servant (PNS) payroll Accounting Information System (AIS) using the Regional Government Information System (SIPD) application at the Population and Family Planning Control Office of Ponorogo Regency. The results show that the implementation of SIPD in the PNS payroll system at the DPPKB of Ponorogo Regency has supported a structured payroll process and is in accordance with applicable regulations. However, there are still several technical obstacles. Thus, the use of SIPD has been proven to provide a positive contribution to the accountability and transparency of PNS payroll management, although ongoing efforts are needed to improve the quality of its implementation.*

**Keywords:** *Accounting Information System, Civil Servant Payroll, SIPD Application*

### **ABSTRAK**

Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan, karena berperan signifikan dalam menjamin ketepatan, ketertiban, dan akuntabilitas pembayaran gaji pegawai. Penelitian ini meneliti sistem akuntansi penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi pada instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam sistem penggajian PNS di DPPKB Kabupaten Ponorogo telah mendukung proses penggajian yang terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis. Dengan demikian, penggunaan SIPD terbukti memberikan kontribusi positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penggajian PNS, meskipun dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian PNS, Aplikasi SIPD*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam era digitalisasi pemerintahan, sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu sistem yang saat ini digunakan di lingkungan pemerintah daerah adalah SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), yang terintegrasi dengan proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan penggajian pegawai. Penggunaan SIPD bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan inisiatif penting dalam mendorong efisiensi serta keterbukaan dalam administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, penerapan SIPD diharapkan mampu menjadi solusi efektif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses pengawasan dan pengelolaan PNS.

Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, sistem penggajian telah menggunakan aplikasi SIPD sejak tahun 2021. Meskipun telah dilaksanakan secara sistematis, evaluasi terhadap penerapannya masih diperlukan untuk melihat efektivitas sistem informasi akuntansi yang dijalankan. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus pada struktur sistem informasi penggajian berdasarkan teori Mulyadi, yaitu menelaah dokumen terkait, catatan terkait, dan fungsi terkait dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Permasalahan pada aplikasi SIPD sering terjadinya kendala yaitu eror (gangguan teknis) pada aplikasi SIPD yang berdampak luas. Terjadinya eror pada aplikasi ini adalah terdapat pada masalah teknis atau sistem yang menyebabkan fungsi pada aplikasi tersebut terganggu atau tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini sangat menghambat proses pengelolaan pada sistem akuntansi penggajian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo. Beberapa contohnya adalah aplikasi tidak bisa diakses.

Ketika terjadi kesalahan pada salah satu data, maka hal tersebut dapat menyebabkan seluruh wilayah mengalami eror secara bersamaan. Kondisi ini umumnya terjadi pada awal dan akhir bulan. Karena hal tersebut sangat mengganggu terutama pada waktu proses penggajian yang dilaksanakan setiap tanggal satu.

Aplikasi SIPD juga kerap mengalami kendala dalam proses penginputan data, yaitu data yang dimasukkan oleh bendahara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo, tidak bisa diproses atau ditolak oleh sistem tanpa penjelasan yang jelas. Menu pada aplikasi SIPD juga sering mengalami penambahan fitur, perubahan ini dapat mempengaruhi stabilitas aplikasi dan menyulitkan pengguna dalam menjalankan tugas administrative secara konsisten.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah keterbatasan kewenangan daerah dalam menangani kendala teknis. Jika terjadi masalah, instansi di daerah tidak dapat melakukan perbaikan secara mandiri, melainkan harus melapor dan menunggu penanganan dari pemerintah pusat, yang tentunya memerlukan waktu lebih lama.

SIPD dan akuntansi saling berkaitan dalam penyelenggaraan sistem informasi akuntansi penggajian, pengelolaan aset, dan laporan keuangan. SIPD mencatat atau mendigitalkan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi pada akuntansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, SIPD tidak hanya sekedar perangkat teknis, melainkan merupakan komponen penting dari sistem akuntansi pada keuangan daerah yang menjunjung tinggi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam transaksi keuangan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian menggunakan SIPD, serta mengidentifikasi hambatan dan

kelebihan yang muncul selama pelaksanaannya. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPD khususnya dalam sistem penggajian, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem informasi akuntansi di sektor publik.

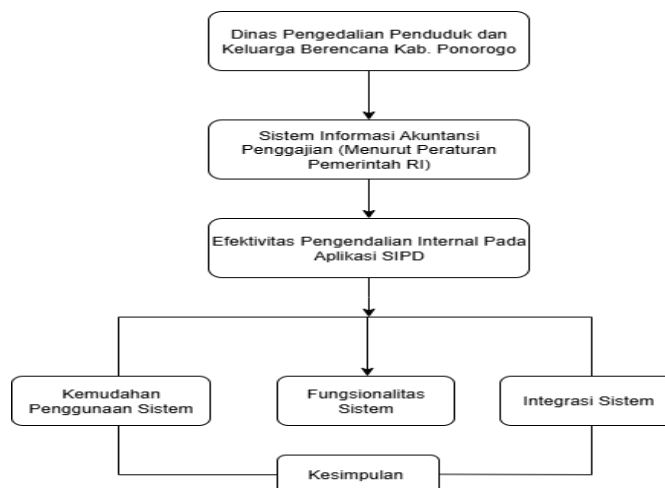
## **B. KAJIAN LITERATUR**

Sistem akuntansi adalah kumpulan langkah dan tata cara yang diterapkan guna mencatat, mengelompokkan, dan memeriksa transaksi keuangan. Proses ini menghasilkan berbagai dokumen keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, disusun berdasarkan pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual dengan sistem yang tertata rapi. Sistem akuntansi berguna untuk mendukung pada pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban pada suatu entitas atau instansi tertentu.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis teknologi yang mampu mengintegrasikan data keuangan dengan sistem informasi lain guna mendukung kelancaran operasional. Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk mencatat, mengevaluasi, merangkum, dan menyajikan informasi keuangan suatu instansi. Pada dasarnya, sistem akuntansi terdiri dari serangkaian prosedur, formulir, dan data yang digunakan untuk mengolah transaksi keuangan menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi instansi terkait.

Gaji atau upah merupakan bentuk kompensasi finansial yang diberikan oleh suatu instansi kepada pegawainya berdasarkan periode waktu tertentu. Sistem akuntansi penggajian sendiri merupakan suatu bagian khusus yang dirancang untuk mencatat, mengevaluasi, serta merangkum seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Pada sistem akuntansi penggajian mencakup prosedur perhitungan gaji, potongan seperti pajak dan iuran, dan catatan kewajiban instansi terhadap pekerjaan pegawai.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah aplikasi nasional yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung administrasi elektronik negara. SIPD dikatakan sebagai sistem terpadu yang meliputi seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini disajikan kerangka pemikiran untuk menjelaskan gambaran alur penelitian secara singkat



**Gambar 1.**  
**Kerangka Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

**C. METODE PENELITIAN**

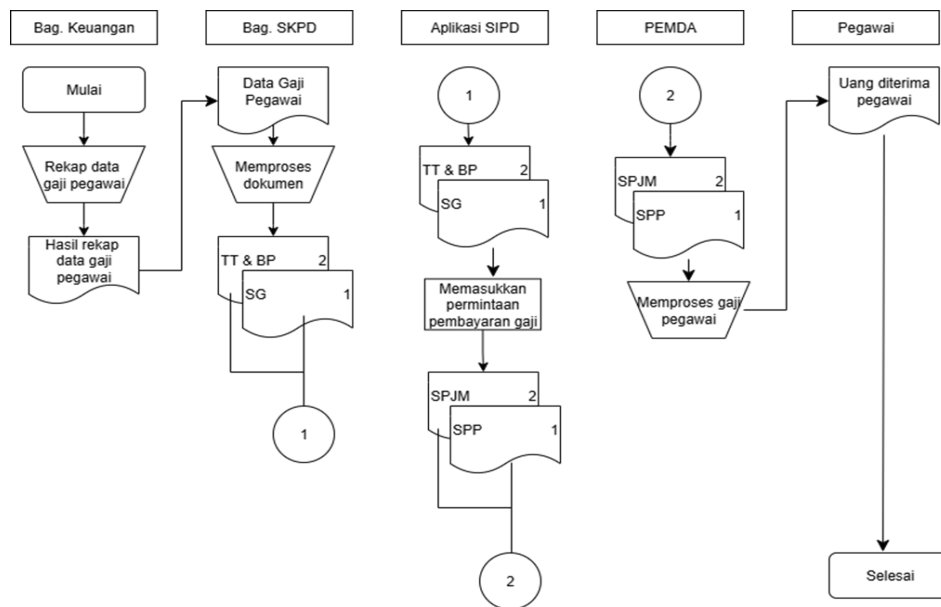
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan penggajian, wawancara dengan bendahara pengeluaran, staf keuangan, serta dokumentasi atas dokumen gaji dan output dari aplikasi SIPD.

Populasi penelitian adalah seluruh kegiatan penggajian yang dilakukan selama tahun 2024–2025. Pengambilan data dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih informan yang berperan langsung dalam proses penggajian. Peneliti menggunakan analisis tematik yang mengelompokkan data berdasarkan komponen sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi, yakni dokumen, catatan, dan fungsi yang terlibat.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem informasi akuntansi penggajian adalah bagian integral dari sistem informasi akuntansi pemerintah daerah yang berfungsi untuk menghimpun, mengolah, serta menyampaikan data yang berkaitan dengan pembayaran gaji kepada aparatur sipil negara, yang sangat penting dalam suatu instansi termasuk di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo tersebut.

Sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo terintegrasi atau terhubung dengan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), yang digunakan untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk keuangan daerah, termasuk penggajian tersebut. Dibawah ini adalah flowchart yang menjelaskan tentang sistem penggajian yang berjalan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo.



**Gambar 2.**  
**Flowchart Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Proses penggajian pegawai di Dinas dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan beberapa bagian, yaitu bagian keuangan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), PEMDA (Pemerintah Daerah), dan Pegawai. Seluruh alur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai berjalan secara tertib, akurat, dan sesuai prosedur.

1. Proses penggajian diawali dari bagian keuangan, yang bertugas untuk melakukan rekapitulasi data gaji pegawai berdasarkan informasi dan perhitungan yang tersedia. Setelah proses rekap selesai, hasilnya dikirimkan kepada Bagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk ditindaklanjuti.
2. Selanjutnya, Bagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menerima data gaji pegawai dari bagian keuangan dan kemudian memproses dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti TT (Tanda Terima) BP (Bukti Potong) serta SG (Slip Gaji). Setelah lengkap pengajuan, memasukkan permintaan pembayaran gaji ke dalam aplikasi SIPD untuk permintaan bayar dan pertanggung jawaban mutlak.
3. Di dalam Aplikasi SIPD, dokumen TT (Tanda Terima) BP (Bukti Potong) dan SG (Slip Gaji) diproses, dan operator SIPD melakukan input data untuk memasukkan permintaan pembayaran gaji. Setelah permintaan dimasukkan, aplikasi akan menghasilkan dua dokumen utama, yaitu SPJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
4. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirimkan ke PEMDA (Pemerintah Daerah) untuk diproses lebih lanjut. Di tingkat PEMDA (Pemerintah Daerah), data dan dokumen yang diterima akan diverifikasi dan dijadikan dasar untuk memproses pembayaran gaji pegawai.
5. Setelah proses pembayaran selesai dilakukan oleh PEMDA, gaji akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai, sehingga pegawai dapat menerima haknya secara langsung.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo, sistem akuntansi penggajian pegawai negeri sipil masih belum berjalan dengan sesuai karena masih banyak permasalahannya. Karena sistem akuntansi penggajian memiliki terbatasnya kelengkapan dokumen seperti dokumen pendukung atas perubahan gaji, kartu kehadiran, kartu jam kerja, amplop penggajian, serta bukti pengeluaran kas, menyebabkan pembayaran gaji dilakukan secara langsung melalui sistem debit atau transfer ke rekening pegawai masing-masing. Adapun pencatatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian hanya jurnal umum saja. Untuk fungsi terkaitnya ada 2 yaitu fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian.

Selain itu, aplikasi SIPD secara keseluruhan juga kurang efektif karena terdapat beberapa masalah atau kendala yang muncul, seperti terjadinya eror pada aplikasi SIPD, terjadinya lemot ketika masuk ke dalam aplikasi tersebut, data yang diinput tidak dapat masuk ke sistem, didalam aplikasi menu-menu nya sering ada tambahan yang mempengaruhi aplikasi tersebut, dan ketika ada masalah atau kendala daerah tidak bisa mengatasi sendiri, karena harus ke pemerintah pusat yang bisa menangani.

### **Penerapan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo**

Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengevaluasi, serta menyajikan data terkait pembayaran gaji pegawai. Sistem ini mencakup penentuan gaji pokok, tunjangan, serta potongan seperti pajak, cicilan pinjaman, dan kewajiban lain, hingga menghasilkan perhitungan akhir gaji bersih. Tujuannya adalah agar proses penggajian dapat

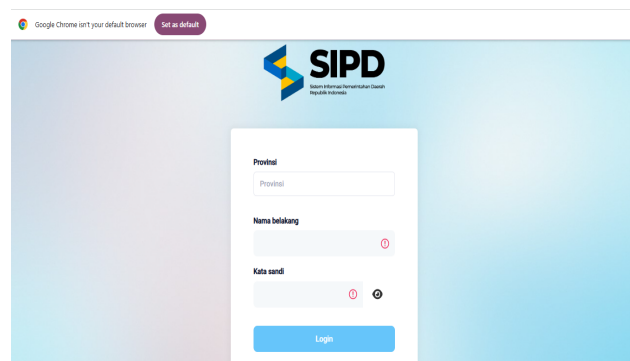
dilaksanakan secara optimal, tertib administrasi, serta akuntabel baik secara internal maupun eksternal. Melalui sistem ini, seluruh transaksi penggajian tercatat secara sistematis mulai dari input data pegawai dan absensi hingga penyusunan laporan, sehingga penggajian dapat berlangsung akurat, aman, dan sesuai regulasi.

Hasil analisis di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi penggajian telah dilakukan sesuai ketentuan pemerintah pusat mengenai mekanisme dan standar penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alur kerjanya meliputi pendataan pegawai, penginputan data gaji, verifikasi, hingga penerbitan dokumen pembayaran yang seluruhnya terintegrasi melalui aplikasi SIPD. Wawancara dengan pengelola keuangan mengonfirmasi bahwa SIPD secara otomatis menghitung gaji pokok, tunjangan, dan potongan sesuai aturan, sehingga memperkecil kesalahan manual, mempercepat pencairan, serta meningkatkan transparansi karena setiap transaksi terekam secara digital dan dapat dipantau kapan saja.

### **Kebijakan Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo**

Kebijakan penggajian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo berlandaskan pada PP No. 15 Tahun 2019 yang mengatur struktur gaji PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta tunjangan melekat lainnya. Ciri khusus di DPPKB Ponorogo adalah seluruh proses penggajian dilakukan melalui aplikasi SIPD, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga setiap pembayaran gaji terintegrasi dengan mekanisme administrasi keuangan daerah dan data pemerintah pusat.

Dengan kebijakan ini, seluruh pembayaran gaji PNS dilakukan secara digital tanpa proses manual. Setiap bulan petugas cukup menginput data gaji dan tunjangan ke SIPD, kemudian sistem melakukan verifikasi, menyusun dokumen SPM dan SP2D, serta mentransfer gaji langsung ke rekening pegawai. Mekanisme ini meningkatkan akurasi perhitungan gaji, mempercepat pencairan, mengurangi kesalahan administrasi, serta menjamin bahwa hak pegawai terpenuhi sesuai regulasi. Selain itu, seluruh transaksi terekam dengan baik sehingga memudahkan audit dan pelaporan.



**Gambar 3.**  
**Halaman Login Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

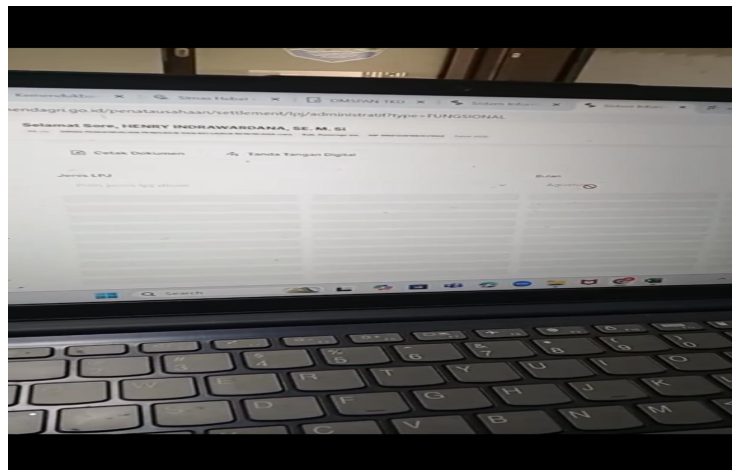
## **Penggunaan Aplikasi SIPD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo**

Sebuah program yang disebut dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dikembangkan oleh pemerintah nasional pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan keuangan, perencanaan, dan pelaporan secara terpadu. Tujuan penggunaan aplikasi SIPD dalam konteks pekerjaan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo adalah untuk meningkatkan efektivitas administrasi keuangan khususnya di bidang penggajian pegawai. Implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat proses pendataan penggajian, mengurangi kehilangan data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Setiap Langkah dari proses, mulai dari memasukkan data kepegawaian hingga, penyusunan daftar gaji, sampai dengan pencetakan slip gaji dilakukan secara terpusat melalui sistem. Hal tersebut dapat membantu bagian keuangan dan akuntansi dalam mengelola dokumen serta Menyusun laporan pertanggung jawaban.

### ***Kemudahan Penggunaan Sistem***

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penerapan aplikasi SIPD di lingkungan pemerintahan daerah adalah kemudahan dalam penggunaan sistemnya. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, aplikasi SIPD dinilai cukup membantu dalam proses pengelolaan keuangan, khususnya penggajian.

Dalam prakteknya, aplikasi SIPD masih sering mengalami kendala teknis. Masalah yang paling sering terjadi adalah error pada sistem, serta akses aplikasi yang lambat (lemot), terutama ketika dibuka secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kendala ini cukup menghambat kelancaran proses kerja, khususnya saat dibutuhkan kecepatan dalam penginputan dan pelaporan data keuangan. Oleh karena itu, meskipun dari sisi penggunaan aplikasi ini cukup mudah, masih diperlukan perbaikan dari sisi teknis untuk mendukung kinerja pegawai secara maksimal.



**Gambar 4.**  
**Laman Dashboard Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

### ***Fungsionalitas Sistem***

Fungsionalitas sistem merujuk pada kemampuan dan kelengkapan fitur yang tersedia dalam suatu aplikasi untuk menunjang kebutuhan penggunanya. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, menjelaskan bahwa dalam satu

sistem, SIPD telah mencakup proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan seluruh proses administrasi keuangan secara terpadu.

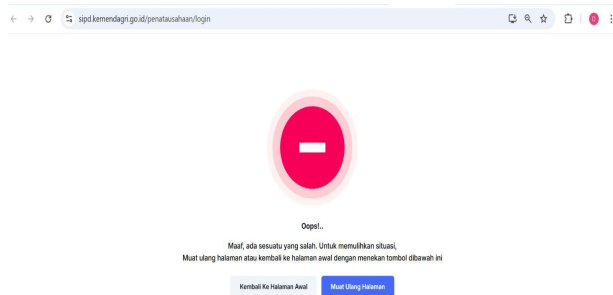
Meskipun demikian, mereka juga mengungkapkan adanya keterbatasan dalam hal penanganan gangguan teknis. Ketika terjadi error atau kendala sistem, pihak daerah tidak dapat melakukan perbaikan secara langsung karena pengelolaan aplikasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses perbaikan, karena pihak daerah hanya bisa menunggu tindak lanjut dari pusat yang terkadang tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara fungsional SIPD sudah memenuhi kebutuhan pengguna, masih diperlukan pengembangan sistem yang memungkinkan penanganan kendala teknis secara lebih cepat dan mandiri di tingkat daerah.

### **Integrasi Sistem**

Integrasi sistem dalam aplikasi SIPD berarti bahwa seluruh data yang diinput dari berbagai bidang atau bagian akan secara otomatis terhubung dan sinkron dengan modul lainnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan duplikasi data, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa secara konsep, sistem SIPD sudah dirancang terintegrasi. Bagian Keuangan juga menjelaskan bahwa data dari berbagai bidang di dalam dinas sudah saling terhubung, sehingga pengguna tidak perlu melakukan input data secara berulang.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketika pengguna melakukan input data, sistem tidak merespons atau data tidak masuk ke dalam sistem dengan semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah dirancang terintegrasi secara struktur, pelaksanaannya secara teknis masih belum optimal. Kendala seperti ini dapat menghambat efektivitas kerja dan menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada sisi teknis dan sistem pendukung agar integrasi data dalam aplikasi SIPD benar-benar dapat berjalan secara maksimal di tingkat daerah.



**Gambar 5.**  
**Hambatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

## **E. PENUTUP**

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo mencakup hal-hal berikut: (a) Penggunaan dokumen yang berkaitan masih belum sepenuhnya memadai atau tidak menyajikan informasi yang relevan secara optimal, karena masih terdapat kekurangan seperti ketiadaan dokumen perubahan gaji, kartu jam kerja, dan amplop gaji, dan buti kas keluar. (b). Catatan terkait yang digunakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo sudah cukup baik yaitu menggunakan jurnal umum. (c). Fungsi terkait yang ada dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo juga sudah cukup baik.

Kebijakan penggajian pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo mengikuti ketentuan pemerintah pusat dan mengacu pada regulasi kepegawaian, seperti kenaikan gaji berkala dan pengajuan tunjangan yang diproses oleh bagian kepegawaian. Proses penggajian dilakukan menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terintegrasi secara nasional. Penggunaan SIPD memberikan kemudahan dalam proses penggajian karena sistem ini bersifat otomatis, terpusat, dan mendukung pencatatan hingga pelaporan secara digital. Proses input data dilakukan satu kali oleh bagian keuangan sesuai format yang ditentukan, dan sistem akan menjurnal serta menyusun laporan keuangan secara otomatis.

Penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan administrasi keuangan, khususnya dalam proses penggajian Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi ini mempermudah proses input data, mempercepat pencatatan, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi kerja. Meskipun demikian, penerapan SIPD di tingkat daerah Masih terdapat sejumlah hambatan teknis, salah satunya adalah sering terjadinya gangguan atau kesalahan pada sistem, seperti sistem yang sering mengalami error, akses yang lambat (lemot), dan terbatasnya kewenangan daerah dalam menangani gangguan aplikasi. Seluruh perbaikan sistem harus melalui pemerintah pusat, sehingga penanganannya tidak selalu dapat dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, meskipun SIPD telah menjadi alat yang bermanfaat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dibutuhkan peningkatan dalam aspek teknis dan pelayanan sistem agar kinerjanya lebih optimal di tingkat daerah.

Sistem informasi akuntansi penggajian telah efektif tetapi baiknya perlu dilengkapi seperti dokumen serta catatan terkait yang kurang, agar dalam proses penggajian akuntansi menjadi lebih lengkap dan akuntabel. Efektivitas sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) juga perlu ditingkatkan karena masih ada beberapa kendala di dalamnya. Diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi lanjutan dengan cakupan wilayah atau objek penelitian yang lebih besar, misalnya membandingkan penerapan SIPD di beberapa instansi pemerintah daerah lainnya sebagai perbandingan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis terkait sistem informasi akuntansi penggajian serta dampak penggunaan SIPD terhadap efektivitas kerja pegawai atau kualitas laporan keuangan.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Endaryati, E. (2021). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Imelda Dian Rahmawati., S. (2018). *BUKU AJAR Sistem Informasi Akuntansi*. Sidoarjo: UMSIDA Press .

- Kadek Bagiana, S. M. (2024). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Ni Komang Erina Liliani\*, I. G. (2022). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12, 22-31.
- Nila Dera Prisma, K. (2022). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1, 12-17.
- ponorogo, D. P. (2025, Juli 18). *dppkb.ponorogo.go.id*. Retrieved from [dppkb.ponorogo.go.id](https://dppkb.ponorogo.go.id): <https://dppkb.ponorogo.go.id/profil/>
- Afifah, S. N. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7, 171-178.
- Agustin Maulani\*1, M. I. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, (1415-1422).
- Anna Marina, S. I. (2017). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Surabaya: UMSurabaya Publishing.
- Efa Wahyu Prastyaningtyas, M. (2019). *SISTEM AKUNTANSI*. Malang: CV. Azizah Publishing
- Zulhendra, B. R. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Wilayah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat . *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* , 2.
- Muhammad Irfan Nasution, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 9, 109-116.
- Indira Septiani, N. W. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7, 193-208.
- Gaffar Gaffar, M. I. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Negeri Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 4, 159 – 173.